

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Siswa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari generasi muda yang memiliki andil besar dalam melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Para siswa dapat dikatakan sebagai tulang punggung negara, karena di tangan merekalah masa depan bangsa akan diserahkan. Baik dan buruknya nasib suatu bangsa tergantung pada kualitas para generasi mudanya. Jika generasi mudanya sejak dini semangat untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan, maka akan berdampak baik untuk kemajuan bangsanya. Sebaliknya, jika generasi muda sudah enggan atau malas untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan maka hanya akan menjadi beban bagi bangsa untuk menanggung hari tuanya.

Masa remaja merupakan masa usia yang labil, karena di usia tersebut siswa masih mengalami apa yang dinamakan dengan masa pencarian jati diri atau penyesuaian diri. Pencarian jati diri atau penyesuaian diri dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Aristya dkk. (2018: 81) ada hubungan signifikan dengan arah positif antara dukungan sosial dan konsep diri dengan penyesuaian diri remaja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang remaja mudah dipengaruhi oleh lingkungannya karena dapat membentuk sikap dan perilakunya, baik ke arah yang positif, maupun negatif. Izzati, dkk (2013: 150) mengatakan bahwa masa remaja

sebagai periode penting karena akibatnya yang langsung berdampak terhadap sikap dan perilaku. Selain itu juga karena pada usia remaja, seorang individu mulai menyerap berbagai konsep keilmuan dan menggunakannya secara langsung di masyarakat. Pada usia itu pula, seorang individu sedang berusaha untuk mengembangkan berbagai aspek yang dimiliki, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Oleh karena itu, pada usia remaja siswa mudah untuk diarahkan pada konsep-konsep positif yaitu konsep keilmuan. Konsep keilmuan yang diserap tersebut termasuk juga di dalamnya berbagai konsep politik. Hal ini menjadi penting agar kelak mereka tidak buta terhadap politik dan menjadi sasaran pembodohan politik, karena siswa yang dikatakan sebagai pemilih pemula memiliki kedudukan strategis dalam setiap pelaksanaan politik praktis yaitu pemilu. Menurut Setiajidi (2011:18), terdapat empat alasan mengapa pemilih pemula memiliki kedudukan strategis dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, yaitu: (1) alasan kuantitatif, pemilih pemula secara kuantitatif mempunyai jumlah relatif banyak; (2) pemilih pemula merupakan satu bagian pemilih yang memiliki pola perilaku sendiri dan sulit diatur atau diprediksi; (3) kekhawatiran adanya kecenderungan untuk tidak memilih karena bingung banyaknya partai politik yang muncul yang pada akhirnya membuat pemilih pemula tidak memilih sama sekali; dan (4) setiap organisasi sosial politik menyatakan sebagai organisasi yang cocok menjadi sarana penyaluran aspirasi para pemilih pemula.

Politik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hal ini menjadi penting dan berkaitan erat

dengan status individu sebagai warga negara. Begitu pula dengan pendidikan dan politik, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan saling berpengaruh. Seperti yang diungkapkan oleh Sirozi (2010:1) bawa lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat, begitu pula sebaliknya lembaga-lembaga dan proses politik berdampak besar pada karakteristik pendidikan negara tersebut.

Cholisin (2013: 29) berpendapat bahwa pendidikan politik adalah kegiatan edukatif yang intensional dan sistematis untuk mengarahkan individu pada proses belajar berpartisipasi di tengah kehidupan politik. Pendidikan politik sebagai upaya yang disengaja untuk memengaruhi individu agar lebih aktif dalam perjuangan politik dan memiliki tanggung jawab etis yang tinggi dalam kegiatan politiknya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pendidikan politik merupakan dasar dalam penerapan politik. Zvulun (2018: 145) mengatakan "*in order to create democratic civic society at its best, it is needed to cultivate political socialization processes in the education system*". Bahwa untuk menciptakan masyarakat sipil demokratis yang terbaik, diperlukan untuk memupuk sosialisasi politik proses dalam sistem pendidikan.

Pada kenyataannya, saat ini pelaksanaan pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat umum cenderung kurang efektif, bahkan bisa dikatakan belum berjalan dengan baik, karena sedikit sekali peraturan atau Undang-Undang secara khusus yang mengatur tentang pendidikan politik. Hanya ada satu undang-undang yang mengatur tentang pendidikan politik, yaitu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa, pendidikan politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik, dan negara dalam hal ini pemerintah tidak melibatkan diri untuk melakukan pendidikan politik. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik yang menjelaskan bahwa negara hanya memfasilitasi program-program pendidikan politik yang dalam hal ini dilakukan oleh para agen politik. Dengan demikian, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan politik bagi remaja harus diberikan, mengingat dalam pendidikan politik tidak sekedar pemberian teori mengenai politik, tetapi juga harus mengetahui bagaimana cara untuk mengimplementasikannya dalam aktivitas politik. Hal ini agar mereka memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, sikap, nilai, orientasi, dan mampu berprestasi dalam politik (Zamroni, 2002: 25).

Pendidikan politik pada remaja penting agar remaja tidak mendapatkan pemahaman yang salah atau keliru tentang politik. Karena banyak sekali masyarakat umum yang mengalami ketidakpercayaan terhadap politik, masyarakat beranggapan bahwa, politik itu penuh dengan praktek atau tindakan korupsi, mementingkan kelompoknya sendiri demi mendapatkan jabatan tertentu atau kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Memang pada kenyataannya tidak sedikit pula para politikus atau pejabat publik yang terlibat kasus korupsi, sehingga harus berurusan dengan lembaga pemberantasan korupsi atau yang lebih dikenal sebagai KPK. Contohnya

seperti kasus korupsi E-KTP yang melibatkan ketua DPR RI periode 2014-2019 Setya Novanto, dengan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 24 April 2018, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, dan denda Rp 500.000.000,- subsidi 3 bulan kurungan (Lahur, 2018: 1).

Begitu juga dengan kasus yang melibatkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli diperiksa KPK sebagai tersangka terkait dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Pemprop Jambi 2018 dan menerima gratifikasi proyek-proyek di Propinsi Jambi (Rachman, 2018:1). Tidak hanya politisi bahkan seorang hakim juga ikut terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, yaitu melibatkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Akil ditangkap KPK karena menerima uang suap 3 miliar dari bupati Gunung Mas dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada. Kasusnya juga merupakan satu-satunya terpidana korupsi yang mendapat vonis seumur hidup dari TIPIKOR, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang melibatkan seorang politisi dan pejabat publik di Indonesia (Avin, 2016:1).

Pentingnya pendidikan politik pada remaja menentukan tingginya tingkat kesadaran politik seseorang. Semakin cepat seorang individu mendapatkan pendidikan politik maka semakin tinggi kesadarannya untuk berpartisipasi dan mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Easton (Sirozi, 2005: 49) berpendapat bahwa, salah satu kondisi fundamental untuk mempertahankan suatu sistem politik adalah bahwa ketika generasi muda dalam suatu masyarakat menginjak dewasa,

mereka harus menguasai ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap sebagaimana diharapkan oleh para anggota dan sistem yang ada. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa, jika sistem politik ingin tetap berlanjut, maka generasi muda harus dididik dengan baik, baik dari segi ilmu pengetahuan, nilai-nilai, maupun sikap-sikap yang dapat diharapkan dari generasi muda nanti.

Pendidikan politik memiliki andil besar dalam mendidik generasi muda supaya mendapatkan pemahaman yang baik dari segi konsep dan simbol politik, terutama untuk membentuk kesadaran politiknya. Pendidikan politik bisa dijadikan sebagai sarana bagi para remaja untuk mematangkan pemahamannya terhadap orientasi politik secara mendasar yang harus dimiliki agar dapat membentuk kesadaran politik tinggi. Kesadaran politik seseorang tidak akan timbul dengan sendirinya tanpa ada motivasi atau orientasi yang jelas. Orientasi tersebut dapat dibentuk melalui peran keluarga, teman sebaya, media massa, atau interaksi langsung dengan partai politik. Selain itu, lembaga pendidikan juga memiliki peran penting untuk membentuk orientasi politik seseorang. Orientasi tersebut tentu memiliki proses yang panjang agar dapat terbentuk secara baik, yaitu seperti melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Jalur pendidikan formal salah satu contohnya seperti melalui lembaga pendidikan yaitu sekolah. Pendidikan non formal yaitu lembaga pendidikan yang tidak formal, seperti pendidikan yang diadakan oleh LSM, Parpol atau organisasi kemasyarakatan. Sedangkan pendidikan informal yaitu lembaga pendidikan yang tidak

terstruktur, contohnya seperti kelompok diskusi, informasi dari media masa, atau surat kabar.

According to a theory that conceptualizes intelligence as a burgher (middle-class, civil) phenomenon intelligence should promote civil attitudes, habits and norms like diligence, order and liberty, which in turn nurture cognitive development political orientations should be related to intelligence, with more intelligent individuals tending towards less extreme political orientations (Rindermann et al., 2012: 217).

Menurut teori konseptual kecerdasan, kecerdasan harus menampilkan sikap, kebiasaan, dan norma-norma seperti ketentuan, ketertiban dan kebebasan, yang kemudian perkembangan kognitif terhadap orientasi politik harus berkaitan dengan kecerdasan, dengan kecerdasan orientasi politik seseorang cenderung tidak terlalu berlebihan. Untuk membentuk kecerdasan tersebut, sangat diperlukan wadah, yaitu sekolah.

Politics does not involve humans only, but also corporations, establishments, societies and communities. In this context, school is a structure within politics which produces politics, examines political systems in effect, and shows their consistencies and inconsistencies (Sönmez, 2012: 58).

Politik tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga lembaga, perusahaan, masyarakat, dan komunitas. Dalam konteks ini, sekolah merupakan struktur dalam politik yang menghasilkan suatu kebijakan politik, menerapkan sistem politik, dan menunjukkan konsistensi dan inkonsistensinya. Sekolah mampu mengubah perilaku yang lebih baik siswa untuk bekal menjadi warga negara yang baik di kehidupan masyarakat (Nihayah, 2014: 844). Sekolah dengan berbagai perangkat seperti kurikulum, buku teks, metode pengajaran, siswa, guru, organisasi kesiswaan dan lain

sebagainya, secara eksplisit dan implisit berpengaruh terhadap orientasi politik secara fundamental. Orientasi fundamental akan mudah terbentuk apabila sudah dimulai sejak usia remaja atau setingkat SMA. Orientasi politik yang terbentuk pada usia remaja akan melekat dalam diri dan terus kontinu sampai kapanpun, kecuali ada lingkungan yang kuat memengaruhi atau merubah orientasi politiknya. Jika seseorang sudah memiliki orientasi politik yang kuat maka kesadaran politiknya akan tumbuh semakin kuat pula. Kesadaran politik berarti menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik. Serta menyangkut minat, perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat hidupnya. Sehingga dapat menjalani hak dan kewajibanya sebagai warga negara yang baik. Menurut Surbakti (2007: 144) kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Print et al. (2012: 9) menyatakan bahwa sekolah menawarkan beragam pilihan pembelajaran dan komitmen yang berkaitan dengan topik politik dan demokrasi. Seorang individu dapat lebih mudah untuk mempelajari atau memahami tentang konsep-konsep politik di lembaga persekolahan. karena sekolah mempunyai sistem kurikulum yang sudah direncanakan dan disusun secara baik. Kurikulum dapat dijadikan sebagai media pendidikan politik yang baik, hal ini dapat menunjang proses penguatan dan pembentukan kesadaran politik pada siswa. Selain itu, pendidikan bagi seorang siswa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pola fikir dan *soft skillnya*. Sehingga akan berdampak positif terhadap kehidupannya. Kadir, dkk

(2012: 59) berpendapat bahwa pendidikan adalah segala situasi yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup.

Education is an effective instrument for socializing the young through promotion of desirable socio cultural values, creation of political awareness which prepares the youth to perform their function to the nation effectively as they grows up (Abonu et al., 2013: 2).

Pendidikan adalah instrumen yang efektif untuk mensosialisasikan kepada kaum muda melalui nilai-nilai sosial budaya yang diinginkan, menciptakan kesadaran politik yang mempersiapkan kaum muda untuk menjalankan fungsinya bagi bangsa secara efektif ketika mereka tumbuh dewasa. Pendidikan juga memiliki peran penting untuk menguatkan kesadaran politik seseorang dalam lingkungan masyarakat secara umum. Seperti apa yang diungkapkan oleh Sastroatmodjo (1995:27) tingkat pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran politik. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat menjadi makin tinggi kesadaran politiknya. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka makin rendah pula tingkat kesadaran politik masyarakat. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Weinschenk & Dawes (2018: 1-2) bahwa.

the relationship between education and political knowledge is highly confounded by genes and/or familial environment. The results from a naive model that does not take into account unobserved family factors indicate that education has a positive and statistically significant effect on political knowledge.

Bahwa hubungan antara pendidikan dan pengetahuan politik sangat ditentukan oleh gen dan/ atau lingkungan keluarga. Hasil dari model naif yang tidak memperhitungkan faktor-faktor keluarga yang tidak teramati

menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pengetahuan politik. Pemahaman politik yang didapatkan siswa di sekolah yaitu melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan Pendidikan Politik, yaitu dengan kajian tentang demokrasi politik (Winarno, 2014: 6-7). Pendidikan Kewarganegaraan secara khusus mendidik siswa untuk menjadi warga negara yang baik, karena materi yang diajarkan berupa kaidah-kaidah atau nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Tapi tidak hanya itu, norma-norma yang terangkum dalam empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta konsep-konsep politik seperti budaya demokrasi dan budaya politik juga terdapat di dalamnya.

Sozhiya & Jasmin (2018:315) berpendapat bahwa *“the political awareness among youngsters is very less, but however the political interest among youngsters is high”*. Kesadaran politik di kalangan anak muda sangat kurang, tetapi bagaimana pun minat politik di kalangan anak muda tinggi. Pada faktanya kesadaran politik seorang siswa yang berada di lingkungan sekolah berbasis Islam tergolong kurang atau rendah, seperti apa yang diungkapkan oleh Rachmiatie, dkk (2005:214) pengetahuan para santri tentang peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan politik ada pada kategori sedang dan rendah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Asyari (2017: 114) bahwa kesadaran politik kaum

santri di pondok pesantren Tuhfaatul Ahbab sangat rendah, karena lingkungan sekitar pesantren tidak membuka celah bagi politik masuk.

SMA Islam terpadu Abu Bakar Yogyakarta merupakan sekolah berbasis Islam yang memadukan antara iman dan taqwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan visi sekolah, yaitu menjadi sekolah unggulan dalam keterpaduan IMTAK dan IPTEK. Sehingga dalam pelaksanaannya SMA Islam terpadu Abu Bakar Yogyakarta menerapkan pendidikan politik melalui mata pelajaran PKn. Hal inilah yang menjadi dasar bagi peneliti, untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam terpadu Abu Bakar Yogyakarta. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang ada di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa, yaitu mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, dan hasil penilaian pembelajaran PKn. Sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dikemukakan terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini masalah yang diidentifikasi sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat umum cenderung kurang efektif, atau belum berjalan dengan baik.
2. Banyaknya masyarakat yang mengalami ketidakpercayaan terhadap politik.

3. Kesadaran politik di kalangan anak muda sangat kurang.
4. Kesadaran politik siswa yang berada di lingkungan sekolah berbasis Islam masih kurang atau rendah.

C. Pembatasan Masalah

Agar lingkup permasalahan dalam peneliti tidak terlalu luas, maka diberikan batasan masalah yaitu pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dirumuskan masalah secara rinci dalam bentuk permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta?
2. Bagaimana kesadaran politik siswa setelah mendapatkan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta.
2. Mengetahui kesadaran politik siswa setelah mendapatkan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara teoretis, kebijakan, maupun praktis yang diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis berupa konsep-konsep yang berkaitan dengan kesadaran politik siswa, khususnya pelaksanaan pendidikan politik di lingkungan Sekolah Menengah Atas.

2. Manfaat kebijakan

Memberikan bahan masukan kepada pengambil kebijakan pemerintah dalam hal ini komisi pemilihan umum dan pemerintahan daerah Yogyakarta dalam kaitannya dengan kesadaran politik siswa SMA.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya kepada:

- a. Guru: meningkatkan profesionalisme guru khususnya guru PKn di SMA dalam menguatkan kesadaran politik pada peserta didik.
- b. Siswa: akan memiliki kesadaran politik yang tinggi dalam lingkup kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Sekolah: meningkatkan kualitas dalam program akademik, manajemen sekolah, dan ekstrakurikuler untuk menguatkan kesadaran politik pada siswa.
- d. Instansi yang berkaitan: hasil penelitian ini juga diharapkan mempunyai kegunaan praktis bagi Komisi Pemilihan Umum khususnya di Daerah Yogyakarta, karena akan menjawab mengetahui sebatas mana tingkat kesadaran siswa SMA dalam politik. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat dipakai untuk mengantisipasi atau mengurangi angka golput untuk Pemilihan Umum atau Pilkada di kota Yogyakarta.